

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Perkembangan pembangunan perekonomian Indonesia khususnya pada masyarakat pedesaan di Bali merupakan hal yang paling penting untuk menunjang perekonomian suatu negara dan pemerataan pembangunan nasional sangatlah erat kaitannya. Salah satu lembaga organisasi sosial yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah Bali adalah Desa Adat. Pemerintah Provinsi Bali membentuk suatu lembaga ekonomi yang dapat menunjang serta meningkatkan perekonomian Desa Adat yang sekarang dikenal dengan nama Lembaga Perkreditan Desa.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Adat yang menjalankan fungsi keuangan Desa Adat untuk mengelola potensi keuangan Desa Adat. Lembaga ini umumnya berbentuk usaha simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat desa dalam bentuk kredit. LPD memberikan manfaat utama dalam meningkatkan perekonomian pedesaan dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa serta membantu kepentingan masyarakat desa di lingkungan LPD tersebut serta melayani masyarakat dari luar Desa Adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa,

bahwa tujuan pendirian sebuah LPD adalah untuk menjaga ketahanan ekonomi Krama Desa Adat melalui tabungan yang teratur, terarah dan penyaluran modal yang produktif, memberantas ijin gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu, mendorong pemerataan dan kesempatan berusaha bagi setiap Krama Desa Adat, meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Atas dasar tujuan tersebut keberadaan LPD diharapkan mampu mendorong pemerdayaan masyarakat dan Desa Adat dibidang ekonomi sekaligus juga diharapkan mampu mendorong pelaksanaan adat dan budaya sebagai warisan leluhur dan jiwa dari Desa Adat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerdayaan Desa Adat dan kelancaran pengelolaan LPD serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhny hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan fungsi dan tujuan LPD itu sendiri maka LPD wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*. Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada kinerja keuangannya (Sitohang dan Tewu, 2020). Serta penerapan *corporate social responsibility* dapat membentuk citra positif dari masyarakat sehingga LPD dapat tumbuh dan berkelanjutan (Ambadar, 2008).

Kabupaten Bangli memiliki 4 kecamatan dengan 159 LPD se-Kabupaten Bangli yang masing-masing berada disetiap Desa Adat di Kabupaten Bangli. Berikut LPD disetiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bangli.

Tabel 1.1  
Sebaran LPD Setiap Kecamatan di Kabupaten Bangli

No	Kecamatan	Jumlah LPD
1.	Bangli	23
2.	Kintamani	61
3.	Susut	39
4.	Tembuku	36
<b>Jumlah</b>		159

*Sumber: LPLPD Kabupaten Bangli, 2021*

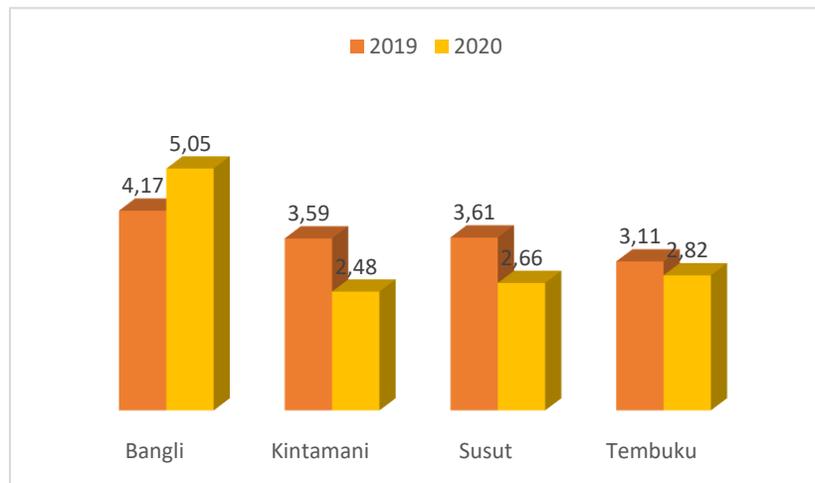
Kehadiran LPD ini sangat penting bagi masyarakat Desa Adat, karena dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, agar kelangsungan lembaga usaha tetap berjalan dengan optimal, maka diperlukan peningkatan kinerja berdasarkan faktor manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Kinerja suatu lembaga usaha dapat dilihat dari kinerja keuangannya.

Menurut Jumingan (2006) kinerja keuangan merupakan gambaran dari hasil pencapaian perusahaan yang telah dicapai melalui berbagai aktivitas untuk meninjau sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan standar akuntansi keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode waktu tertentu (Rudianto, 2013). Sedangkan menurut Irham (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan digunakan untuk mengukur kinerja pada masa

yang bersangkutan dengan membandingkan kinerja masa lalu. Oleh karena itu, keberadaan kinerja keuangan pada LPD memiliki peran penting bagi pemilik, penyimpan, pemerintah dan masyarakat. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh LPD untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan LPD berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan beberapa pendekatan rasio keuangan baik likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas maupun rasio pasar (Prasinta, 2012). Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas yang diukur dengan rasio *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aset yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan (Brigram dan Houston, 2011).

Penelitian ini dilakukan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Dipilihnya LPD di Kecamatan Kintamani dikarenakan LPD di Kecamatan Kintamani mengalami penurunan ROA yang lebih tajam dibanding dengan kecamatan lainnya. Berikut grafik perbandingan ROA pada LPD per-Kecamatan di Kabupaten Bangli tahun 2019-2020.



Gambar 1.1

Grafik Perbandingan ROA pada LPD per-Kecamatan di Kabupaten Bangli

Berdasarkan Gambar 1.1 LPD Kecamatan Bangli mengalami peningkatan ROA tahun 2020 sebesar 0,88% (dari 4,17% menjadi 5,05%). Pada LPD Kecamatan Kintamani mengalami penurunan ROA tahun 2020 sebesar 1,11% (dari 3,59% menjadi 2,48%). Pada LPD Kecamatan Susut mengalami penurunan ROA tahun 2020 sebesar 0,95% (dari 3,61% menjadi 2,66%). Pada LPD Kecamatan Tembuku mengalami penurunan ROA tahun 2020 sebesar 0,29% (dari 3,11% menjadi 2,82%). Sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan ROA minimal yang ideal bagi bank adalah 1,5%. Artinya bahwa jika bank memperoleh keuntungan di bawah nilai yang ditetapkan Bank Indonesia maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola asetnya. Pada grafik tersebut semua LPD sudah memperoleh ROA diatas nilai minimal yang ditentukan, namun ROA yang diperoleh LPD Kecamatan Kintamani mengalami penurunan yang lebih tajam dibanding dengan LPD di kecamatan lainnya. Maka dari itu LPD harus

mampu memaksimalkan kinerja keuangannya. Dalam memaksimalkan kinerja keuangannya, LPD perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani.

Kinerja keuangan dipengaruhi oleh *good corporate governance* (Setyawan dan Putri, 2013). Menurut Purwoko dan Sudiyatno (2013) kinerja keuangan dipengaruhi oleh BOPO, NPL, NIM, CAR dan LDR. Menurut Haryanti dan Rahardjo (2013) kinerja keuangan dipengaruhi oleh *corporate social responsibility*, kinerja lingkungan dan struktur *corporate governance*. Rosiliana, dkk (2014) menyatakan kinerja keuangan dipengaruhi oleh *corporate social responsibility*. Menurut Yunizar dan Rahardjo (2014) kinerja keuangan dipengaruhi oleh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan. Nurhudha dan Suwarti (2015) menyatakan kinerja keuangan dipengaruhi oleh *corporate social responsibility*, *intellectual capital* dan kinerja lingkungan. Selain itu, Dewanti dan Mulyadi (2019) menyatakan kinerja keuangan dipengaruhi oleh *good corporate governance*, *corporate social responsibility* dan budaya Tri Hita Karana. Jadi, dapat disimpulkan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah *good corporate governance*, BOPO, NPL, NIM, CAR, LDR, *corporate social responsibility*, *intellectual capital*, kinerja lingkungan, ukuran perusahaan dan budaya Tri Hita Karana. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan menggunakan variabel *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan. Karena variabel *good corporate governance* berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pada penelitian yang dilakukan oleh Setyawan

dan Putri (2013), Mahaendrayasa dan Putri (2017) serta Dewanti dan Mulyadi (2019), selain itu variabel *corporate social responsibility* berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pada penelitian Rosiliana, dkk (2014), Suciwati, dkk (2016) serta Gantino (2016).

*Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003; dalam Kaihatu, 2006). Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IIGC) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Setiap perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan dan mengevaluasi kinerja secara berkesinambungan agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, LPD sebagai lembaga keuangan perlu menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam lingkungan kerjanya. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan LPD sangat penting, karena langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan LPD secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD (Kirmsmaya, 2014). Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyebutkan bahwa terdapat lima prinsip dalam *good corporate governance* yang terdiri dari lima aspek yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *indenpendency* dan *fairness*.

Penelitian sebelumnya mengenai *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh Setyawan dan Putri (2013), Mahaendrayasa dan Putri (2017) serta Dewanti dan Mulyadi (2019) menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasinta (2012) serta Ferial dan Handayani (2016) yang menemukan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

*Corporate Social Responsibility* adalah klaim *stakeholders* agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dalam praktik bisnis yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen dan lingkungan (Nugroho, 2007). Tanudjaja (2006) mendefinisikan CSR sebagai sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku tangan kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Sedangkan menurut Wibisono (2007) *corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penerapan *corporate social responsibility* dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dimana para investor cenderung menanamkan modal kepada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Dengan melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa

keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran LPD. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi-bisnis kepada LPD. Semakin baik LPD dalam melaksanakan *corporate social responsibility*, maka akan terbangun *image* perusahaan yang baik pula di mata masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan (Zuhroh dan Sukmawati, 2003).

Penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh Rosiliana, dkk (2014), Suciwati, dkk (2016) serta Gantino (2016) mendapatkan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marissa, dkk (2013) serta Mustafa dan Handayani (2014) menemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan fenomena dimana adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu membuat penelitian ini menjadi lebih menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada LPD di Kecamatan Kintamani sebagai berikut:

- (1) Adanya penurunan ROA pada LPD di Kecamatan Kintamani, LPD di Kecamatan Susut dan LPD di Kecamatan Tembuku.
- (2) Penurunan ROA paling tajam terdapat pada LPD di Kecamatan Kintamani.
- (3) Terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada LPD seperti *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, BOPO, NPL, NIM, CAR, LDR, *Intelectual Capital*, Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan dan Budaya Tri Hita Karana.
- (4) Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar pengamatan tidak keluar dari pokok pembahasan. Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu pengambilan data hanya dilakukan pada pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani tahun 2019-2020.

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani?
- (2) Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani?
- (3) Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani.
- (2) Pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani.
- (3) Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani.

#### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- (1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan pengkajian ulang teori mengenai pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani.

(2) Manfaat Praktis

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan maupun karyawan LPD dalam mengambil keputusan berkaitan dengan masalah keuangan khususnya mengoptimalkan kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani.

